



LAPORAN KEGIATAN RESES

**MASA PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2023 / 2024
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

Juru Bicara :

Hj. NUR SA'ADAH, SPd.I MH

SENIN, 26 FEBRUARI 2024

=====

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
JI Pahlawan NO 7 Telepon (024) 8454085 PSW-123**

LAPORAN HASIL PELAKSAN KEGIATAN RESES

MASA PERSIDANGAN PERSIDANGAN KEDUA TAHUN 2023 / 2024 FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DRPD PROVINSI JAWA TENGAH

JURU BICARA : Hj. NUR SA'ADAH, SPd.I MH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh

- Yth. Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah atau yang mewakili;
- Yth. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- Yth. Saudara Sekretaris DPRD beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta,
- Hadirin Sidang Paripurna DPRD, rekan-rekan wartawan, adik adik mahasiswa dan seluruh masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada yang berbahagia.

Pertama kami mengajak hadirin semua untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini dengan agenda Penyampaian Laporan Reses Penjaringan aspirasi masyarakat Masa Persidangan Kedua Tahun 2023 / 2024 dari Fraksi-Fraksi DPRD Jawa Tengah.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, tauuladan dalam mengatur masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan iringan doa semoga kita dapat meneladani perilaku beliau. Amin Ya robbal 'alamin

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Baru saja kita menyelesaikan hajat demokrasi di Negara kita tercinta berupa Pemilihan Umum Presiden / Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPD, Pemilihan Anggota DPR RI dan DPRD yang mana hingga saat ini masih berlangsung proses penghitungan secara manual berjenjang di Komisi Pemilihan Umum.

Harapan kita semua tentu semoga mereka dan kita semua yang terpilih selalu amanah dalam menjalankan sumpah jabatannya membawa negara Indonesia semakin Adil Makmur untuk Semua, AMIN

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Kegiatan Reses yang kita lakasakan ini diantaranya untuk melaksanakan peran dan kegiatan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengawasan, serta memberikan informasi lain yang dipandang perlu dan sekaligus berfungsi sebagai kontrol rakyat terhadap Anggota Dewan yang diwakilkan sebagaimana disebutkan dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 ayat (1), DPRD Provinsi anggota DPRD sebagai representasi rakyat berhak menjangring Aspirasi yang berbasis Daerah Pemilihan.

Selain itu kegiatan Reses Anggota DPRD merupakan perwujudan dari tugas Anggota Dewan, yaitu tugas penyerapan aspirasi dan tugas controlling terhadap kinerja eksekutif yaitu dengan menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2019 tentang Tata Tertib Anggota DPRD Jawa Tengah.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,
Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada regulasi peraturan sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang hak dan Keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi / Kabupaten dan Kota.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 ;
5. Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah
6. Rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Tengah tanggal 7 dan 20 Desember 2023

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Kedua Tahun 2023 / 2024 telah dilaksanakan oleh anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal **21 - 28 Januari 2024** dengan kegiatan menyerap, menampung aspirasi serta memastikan program dan capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah berjalan sesuai dengan amanat yang digariskan.

Seperti kita pahami bahwa arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2024 diprioritaskan pada upaya untuk mensukseskan proses demokrasi melalui Pemilihan Umum, pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah **yang terperinci dalam 10 program prioritas daerah.**

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Sebelum penyampaian laporan hasil reses, terlebih dahulu kami sampaikan terlebih dahulu kondisi perekonomian secara umum di Jawa Tengah bahwa Pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2023 yang menunjukkan pertumbuhan perekonomian sebesar 4,92 Persen, angka

ini jika dibandingkan periode tahun yang sama (Y-on-Y) kondisi ini melemah sebesar 0,35 Persen yang mana pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada saat itu sebesar 5,27 Persen.

Selanjutnya terkait dengan angka Kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Tengah pada 2023 menurut data yang disampaikan Saudara Pejabat Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu turun 0,87 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 1,97 persen, atau dengan kata lain tahun ini menyisakan 1,1 persen kemiskinan ekstrem.

Kondisi tersebut tetap harus menjadi konsen kita semua pada tahun 2024 ini agar pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah akan lebih baik lagi.

Pimpinan dan Hadirin Peserta sidang Paripurna yang kami hormati,

Beberapa masukan dari masyarakat yang dapat kami tangkap berupa usulan prioritas pembangunan wilayah, diantaranya adalah peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, pembangunan Infrastruktur, Peningkatan mutu pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan, pelayanan publik yang professional, pemerataan pembangunan dan lain sebagainya.

Secara rinci beberapa masukan dan aspirasi yang kami terima selengkapnya kami sampaikan dalam beberapa tema bidang sebagai berikut :

A. **BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

1. Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mengejar ketertinggalan guna meningkatkan daya saing wilayah dan pemerataan pembangunan. dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur juga harus ramah lingkungan dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
2. Dalam rangka pembangunan Infrastruktur daerah Fraksi PKB mendorong Pemerintah Daerah di Jawa Tengah terus melakukan koordinasi kewilayahan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah dengan berbagai perangkat Musyawarah dan koordinasi yang ada termasuk didalamnya pola koordinasi Musyawarah Pembangunan Daerah berbasis Desa.

Hal ini Penting agar kejadian melesetnya target pembangunan yang ada di Jawa Tengah dapat dihindari dan diprediksi sejak awal yang dikarenakan salah perhitungan atau perencanaan yang kurang matang.

Selain itu Desa sebagai ujung tombak pembangunan harus mampu merencanakan pembangunan skala prioritas dengan tata kelola anggaran desa yang terus bertambah menjadi lebih baik.

3. Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan maupun ruas jalan baru atau pelebaran antar wilayah di Jawa Tengah sebagai akses yang strategis jalan utama untuk jalur transportasi, lintas batas, jalur perdagangan dan jasa, Terlebih saat ini banyak ruas jalan yang rusak diakibatkan oleh bencana alam yang melanda di Jawa Tengah.

4. Fraksi PKB Mendorong kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pembangunan pedesaan secara terpadu baik infrastruktur maupun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari pendekatan kewilayahan yang berorientasi pada pemberdayaan potensi daerah, diantaranya :

B. SINERGITAS PERANGKAT DAERAH

Dalam tema ini Fraksi PKB memberikan masukan beberapa point diantaranya :

1. Memantau perkembangan perekonomian di Jawa Tengah perlu dilakukan kembali pencermatan terhadap anggaran (tagging) inflasi pada APBD Kab/Kota serta optimisasi perencanaan anggaran tahun berjalan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun;
2. Fraksi PKB mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pencermatan updtng dalam inputing data harga harian pada laman SP2KP Kemendag dalam rangka meminimalisir kesalahan yang berdampak pada kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Tertinggi daerah;
3. Fraksi PKB Mendorong Pemerintah Daerah untuk terus melakukan terobosan - terobosan baru dalam upaya percepatan pengendalian harga beras di Jawa Tengah yang saat ini terus naik hingga mencapai Rp. 18.000,- per Kg yang sangat membebani keutuhan masyarakat.

C. BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan adalah tonggak kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju tentu merupakan cita-cita yang ingin di capai oleh setiap negara di dunia. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan.

Pendidikan merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Indonesia adalah salah satu Negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan bernegara **”mencerdaskan kehidupan bangsa”** yang seharusnya jadi sumbu perkembangan pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Yang kita rasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan didalam mutu pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan yang sangat sangat rendah dibandingkan daerah / negara lain tentu menghambat suplay sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Terkait permasalahan pendidikan perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Persoalan infrastruktur dan kesejahteraan di dunia pendidikan masih menjadi persoalan klasik seperti banyaknya sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang kelas, ruang guru, media belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, baik Sekolah umum maupun Sekolah Keagamaan di Jawa Tengah yang rusak berat, sedang maupun ringan.

Kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Fraksi PKB mendorong supaya ada Skala prioritas pembangunan, dan pendataan yang akurat, baik sekolah negeri maupun swasta termasuk bagi kesejahteraan dan profesionalisme tenaga pendidiknya terutama di daerah - daerah pinggiran atau pedesaan.

2. Memastikan dana stimulan tenaga pendidikan madrasah dan bantuan operasional madrasah dan keagamaan tidak dihapus dari penganggaran APBD Jawa Tengah tahun 2024 terus dikawal keberadaanya.
3. Peningkatan mutu Pendidikan di seluruh Jenjang yaitu pendidikan dasar dan menengah baik lembaga pendidikan negeri maupun swasta, Pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan diantaranya dengan Penganggaran Sarana Prasarana Pendidikan, serta Peningkatan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Guru sekolah.

D. BIDANG PENGEMBANGAN PERTANIAN

1. Fraksi PKB mendapat masukan dari masyarakat agar terus mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperhatikan sektor pertanian dan regenerasi petani muda sebagai sebuah pilihan pekerjaan yang menarik dan berprospek bagus dengan kemudahan informasi, pelatihan teknologi pertanian, pemberian saprodi dan seterusnya.
2. Kelangkaan maupun jalur distribusi pupuk pertanian hampir merata di seluruh Jawa Tengah, masalah ini sudah lama tak kunjung bisa diselesaikan. Fraksi PKB tak henti hentinya untuk

menyuarakan kegelisahan para petani khususnya soal distribusi pupuk yang mudah, murah dan cukup

3. Kaitannya harga beras yang melambung tinggi, Fraksi PKB mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan Pemanfaatan Beras Cadangan Pangan Provinsi (CPP) yang ada, khususnya kepada daerah daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrim dan rawan pangan serta melakukan langkah pemberian subsidi harga pangan kepada produsen atau konsumen dalam upaya intervensi harga pangan yang mengalami gejolak harga.
4. Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah mendorong Perhatian Pemerintah Daerah terhadap Petani yang mengalami kegagalan panen akibat cuaca buruk, banjir, bencana alam, hama dengan meningkatkan peran penyuluh pertanian serta pemberian kemudahan dalam mengakses Saprodi Pertanian.
5. Jalan pertanian perlu dibangun dan diperbaiki baik jalan di lingkungan persawahan dan perkebunan, agar mempermudah proses pengangkutan hasil panen para petani. Jalan pertanian adalah salah satu bagian dari Infrastruktur yang sangat vital. Jalan yang baik, memudahkan kita untuk melakukan akses pada suatu tujuan dan begitu pula sebaliknya jalan yang rusak akan sulit untuk melakukan akses pada suatu tujuan.

E. BIDANG KEUANGAN DAERAH, SOSIAL DAN EKONOMI

Terkait permasalahan Keuangan, Sosial dan Ekonomi perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi PKB mendorong adanya kemudahan investasi untuk pengembangan industri dan pariwisata pedesaan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah,
2. Perlu dipikirkan pola pemerataan Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh berbagai masalah, diantaranya keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, desa tidak minim informasi dan akses untuk memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan lain sebagainya.
3. Fraksi PKB mendorong kepada Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah se Jawa Tengah membuat kebijakan dan Inovasi kemudahan berwirausaha untuk masyarakat. Kemudahan berusaha dapat diwujudkan melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dijalankan dengan prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.
4. Pengembangan ketrampilan berusaha untuk masyarakat pedesaan maupun kaum miskin di perkotaan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Jawa Tengah.

5. Awal Tahun 2024 sudah memasuki musim hujan, Fraksi PKB DPRD Jawa Tengah mendorong dan mengingatkan Pemerintah Daerah untuk terus waspada dan cepat dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, serta kerusakan jalan.
6. Fraksi PKB juga menerima masukan berupa Pembangunan fasilitas umum yang ramah dengan hak-hak penyandang disabilitas sebagai aspek penting dalam perencanaan pembangunan nasional.

Hadirin sidang paripurna DPRD yang kami hormati

Demikian Penyampaian Laporan hasil Reses dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Jawa Tengah Masa sidang Keud tahun 2023 / 2024. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua untuk menjalankan amanah dengan baik, Amin.

**Wallahulmuwafiq Ila Aqwamithariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Semarang, 26 Februari 2024

FRAKSI PKB DPRD PROVINSI JATENG

ttd

H. SARIF ABDILLAH, S.Pd.I

Ketua

ttd

H. WAKHID JUMALI, Lc

Sekretaris